# PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2010-2015

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar sarjana Pendidikan (S.Pd.)Program Studi Pendidikan Ekonomi (PE) Pada
Universitas Nusantara PGRI Kediri**

**OLEH :**

**SITI DURSOIMAH
NPM: 12.1.01.04.0023**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)**

**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

**2016**

Skripsi oleh:

**SITI DURSOIMAH**
NPM: 12.1.01.04.0023

Judul:

**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2010-2015**

Telah disetujui untuk diajukan kepada
Panitia Ujian/ Sidang Skripsi Prodi Pendidikan Ekonomi (PE)
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: 6-8-2016

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. M. Anas, S.E., M.M., M.Si.** | **Dr. Rr. Forijati, S.E.,M.M.** |
| **NIDN.0028106601** | **NIDN.0028016701** |

ii

Skripsi oleh:

**SITI DURSOIMAH**
NPM: 12.1.01.04.0023

Judul:

**PENIALAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2010-2015**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/ Sidang Skripsi
Prodi Pendidikan Ekonomi (PE) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Pada tanggal: 6 - 8 - 2016

**Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan**

Panitia Penguji:

1. Ketua : Dr. M. Anas, S.E.,M.M.,M.Si
2. Penguji I : Tjetjep Yusuf A., S.Pd., S.E., M.M.
3. Penguji II : Dr. Rr. Forijati, S.E.,M.M.

Mengetahui,
Dekan FKIP

**Dr. Hj. Sri Panca Setyawati, M.Pd.**
**NIDN. 0716046202**

iii

# PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2010-2015

SITI DURSOIMAH
12.1.01.04.0023
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – Pendidikan Ekonomi
Email: imah.kdr@gmail.com
Dr. M. Anas, S.E., M.M., M.Si.dan Dr. Rr. Forijati, S.E.,M.M.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

**ABSTRAK**

**Siti Dursoimah:** Penilaian Kinerja Keuangan Kota Kediri Tahun Anggaran 2010-2015, Skripsi, Pendidikan Ekonomi, FKIP UN PGRI Kediri, 2016.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis laporan keuangan pemerintah Kota Kediri untuk mengetahui kinerja dalam mengelola keuangan daerahnya apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas , *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* dan rasio pertumbuhan.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Kediri yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Kota. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan obyek penelitian yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri tahun anggaran 2010-2015

Hasil penelitian ini adalah rasio kemandirian Kota Kediri tahun anggaran 2010- 2015 yaitu 15,12%, 19,49 %, 17,66%, 17,38%, 21,20%, 24,17% dinyatakan baik. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Kota Kediri tahun anggaran 2010-2015 yaitu 109,05%, 113,86%, 110,31%, 105,60%, 123,70%, 120,55% dan 2,32%, 1,85%, 2,49%, 2,03%, 1,48%, 2,09% dinyatakan efektif dan efisien. Rasio aktivitas belanja rutin dan belanja pembangunan tahun anggaran 2010-2015 yaitu 77,66%, 85,18%, 77,48%, 85,71%, 84,28%, 84,42% dan 22,16%, 14,63%, 22,50%, 14,29%, 15,67%, 15,57% dinyatakan baik sesuai proporsi dan DSCR Kota Kedi tahun anggaran 2010-2015 yaitu hanya tahun 2010 sebesar 102.109,37% dan tahun 2013 sebesar 798,86% dan untuk tahun 2011, 2013, 2014 dan 2015 tidak memiliki DSCR. Rasio pertumbuhan Kota Kediri tahun anggaran 2010-2015 bernilai positif, dinyatakan baik dan kecenderungan naik dari tahun ke tahun. Akan tetapi ada rasio pertumbuhan belanja pembangunan ada yang bernilai negatif yaitu tahun 2010-2011 dan 2012-2013 sebesar -33,33%, dan -34,42%.

Rekomendasi untuk Pemerintah Kota Kediri yaitu lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat mengalokasikannya ke sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta Pemerintah Kota Kediri diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya agar tidak ada penurunan rasio untuk periode berikutnya.

**Kata Kunci:**kinerja, penilaian kinerja, kinerja keuangan.

## I. LATAR BELAKANG

Setelah masa orde baru berakhir mulai mencuatlah adanya tuntutan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan masing-masing daerah. Otonomi daerah menjadi suatu trobosan yang diharapkan memberikan dampak positif dalam sistem pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menyatakan pemerintah daerah didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatakan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan konsep *Value For Monay*( ekonomi, efektif dan efisiensi) dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara *Value For Monay*, m 1 pu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Keberhasilan otonomi daerah salah satu indikator pentingnya yaitu pengelolaan keuangan daerah. Setiap daerah diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dengan hasil potensi yang dimiliki daerah tersebut, sehingga memperkecil ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.

Keberhasian pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam mewujudkan *Good Gavernance*. Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan *Good Gavernance*, maka adalah tepat untuk memperhatikan masalah akuntabilitas.

Menurut Mahmudi (2007: 2) Akuntabilitas adalah “amanah” yang

berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumberdaya publik yang dipercayakan kepadanya. Setiap rupiah uang publik harus dipertangguangajawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uanganya untuk membiayai pembanguanan dan berjalannya roda pemerintahan.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan yaitu pembangunan di berbagai bidang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan akuntabilitas keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan

melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul "Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 -2015".

## II. METODE

Menurut Sugiyono (2012: 3),metode penelitian adalah sekumpulan praturan, kegiatan, dan prosedur yang dilakukan oleh pelaku suatu disiplin.

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang tepat guna untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ex Post Facto.*

Menurut Sugiyono (2009: 7), *Ex Post Facto* adalah "suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut kebelakang untuk mengetahui faktor- faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut".

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 62), *Ex Post Facto* adalah " suatu penelitian/ gejala atau masalah yang terjadi sebelum penelitian diadakan, atau model penelitian yang pada pokoknya dikumpulkan setelah terjadi sesuatu".

Dari dua penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa *Ex Facto Facto* merupakan metode yang digunakan jika data atau peristiwa yang diteliti sudah terjadi. Penggunaan metode ini dimaksudkan karena peneliti mendeskripsikan data-data laporan keuangan.

**Teknik Analisis Data**

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

   Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah yang dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
   a. Rasio Efektifitas

      Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

      Rasio Efektifitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

   b. Rasio Efisiensi

      Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

      Rasio Efisiensi=

$$\frac{\text{Biaya yang diperlukan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

3. Rasio Aktifitas (Rasio Keserasian)

   Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

   Rasio Belanja Rutin terhadap APBD=

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

   Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD =

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

   Untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membayar pinjaman/hutang. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{DSCR}=\frac{\text{(PAD+BD+DAU)-BW}}{\text{Total (pokok angsuran+bunga+biaya pinjaman)}}$$

   Dimana:

   PAD : Pendapatan Asli Daerah

   BD :Bagian Daerah

   DAU : Dana Alokasi Umum

   BW : Belanja Wajib

5. Rasio Pertumbuhan

   Rasio pertumbuhan ini mengukur seberapa besar tingkat kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevalusi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

   Rasio Pertumbuhan PAD=

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}}$$

   Rasio Pertumbuhan ∑ Pendapatan =

$$\frac{\text{Realisasi Pertumbuhan } \sum \text{ Pendapatan } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan } \sum \text{ Pendapatan } x_{n-1}}$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin=

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Rutin } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Rutin } x_{n-1}}$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan=

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } x_{n-1}}$$

Keterangan:

$x_n$ = tahun yang dihitung.

$x_{n-1}$ = tahun sebelumnya.

## III. HASIL DAN KESIMPULAN

a. Rasio Kemandirian

Tabel 4.11

Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010-2015

| Uraian | Tahun Anggaran | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rasio Kemandirian | 15,12% | 19,49 % | 16,98% | 17,38% | 21,20% | 24,17% |
| Rata- rata Rasio Kemandirian | 19,06% | | | | | |
| Keterangan | Kemandirian Pemerintah Kota Kediri dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat mengalami peningkatan dan semakin baik. | | | | | |

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa Rasio Kemandirian Kota Kediri pada tahun anggaran 2010 sebesar 15,12%, naik pada tahun 2011 sebesar 19,49% tetapi mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 16,98% akan tetapi mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013 sebesar 17,38%, pada tahun 2014 naik sebesar 21,20% dan tahun 2015 naik sebesar 24,17%.

Hasil perhitungan rasio kemandirian Pemerintah Kota Kediri tahun anggaran 2010-2015 terlihat bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, membangun dan pelayanan sosial masyarakat mempunyai kecenderungan naik dan sudah lebih baik dari tahun ke tahun, namun mengalami penurunan tahun 2012. Oleh sebab itu hasil yang baik ini perlu di tingkatkan agar tidak mengalami penurunan.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Tabel 4.12

Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010-2015

| Uraian | Tahun Anggaran | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rasio Efektifitas | 109,05% | 113,86% | 110,31% | 105,60% | 123,70% | 120,55% |
| Rata- rata Rasio Efektifitas | 113,85% | | | | | |
| Rasio Efisiensi | 2,32% | 1,85% | 2,49% | 2,03% | 1,48% | 2,09% |
| Rata-rata Rasio Efisiensi | 2,04% | | | | | |
| Keterangan | 1. Rasio Efektivitas<br>Pemerintah Kota Kediri dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dikatakan sangat efektif (semakin besar rasio semakin baik)<br>2. Rasio Efisiensi<br>Pemerintah Kota Kediri dalam merealisasikan dalam memungut sumber pendapatan asli daerah dikatakan efisien (semakin kecil rasio semakin baik) | | | | | |

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 4.12 diketahui bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kota Kediri pada tahun anggaran 2010-2015 yaitu sangat efektif karena< 100% (semakin tinggi rasio efektifitas semakin baik ) dan rasio ini mempunyai kecenderungan turun dari tahun ke tahun dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengan target pendapatan asli daerah. Dan dapat dilihat rasio efektifitas dari tahun 2010 sebesar 109,05%, naik tahun 2011 sebesar 113,86%, mengalami penurunan sebesar 110,31% pada tahun 2012, tahun 2013 turun sebesar 105,60% tetapi mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 sebesar 123,70% dan tahun 2015 turun sebesar120,55%.

Sedangkan untuk rasio efisiensi Pemerintah Kota Kediri tahun angaran 2010 sebesar 2,32% mengalami kenaikan sebesar 1,85% pada tahun 2011 dan menurun pada tahun 2012 sebesar 2,49%, untuk tahun 2013 sebesar 2,03% dan mengalami kenaikan kembali sebesar 1,48% pada tahun 2014 tetapi turun pada tahun 2015 sebesar 2,09%. Dapat dilihat rasio ini mengalami kecenderungan naik karena kenaikan terjadi pada tahun 2011, 2013 dan 2014 ini berarti Pemerintah kota Kediri efisien dalam memungut sumber pendapatan asli daerah.

Dari kedua rasio tersebut dapat menggambarkan Kinerja Pemerintah Kota Kediri yang baik karena rasio efektifitas dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan asli daerah mencapai kisaran antara 105%-123%, sedangkan rasio efisiensinya berkisar antara 1%-2%.

c. Rasio Aktivitas (Keserasian)

Tabel 4.13

Rasio Aktivitas (Keserasian) Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010-2015

| Uraian | Tahun Anggaran | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rasio Aktivitas Belanja Rutin | 77,66% | 85,18% | 77,48% | 85,71% | 84,28% | 84,42% |
| Rata- rata Belanja Rutin | 82,46% | | | | | |
| Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan | 22,16% | 14,63% | 22,50% | 14,29% | 15,67% | 15,57% |
| Rata-rata Belanja Pembangunan | 17,47% | | | | | |
| Keterangan | 1. Belanja Rutin<br>Proporsi belanja rutin yang mendominasi total belanja daerah pada Pemerintah Kota Kediri sudah baik karena kisaran antara 60%-90%<br>2. Belanja Pembangunan<br>Proporsi belanja pembangunan yang mendominasi total belanja daerah pada Pemerintah Kota Kediri cukup baik karena kisaran antara 5%-20%. | | | | | |

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.18 pada tahun 2010 rasio belanja rutin sebesar 77,66%, naik 85,18% pada tahun 2011, mengalami penurunan tahun 2012 sebesar 77,48% dan naik lagi sebesar 85.71% tahun 2013 , serta turun sebesar 84,28% pada tahun 2014 dan naik tahun 2015 sebesar 84,42%. Rasio belanja rutin untuk Pemerintah Kota Kediri sudah baik dan memenuhi syarat proporsi belanja operasi yang mendominasi total belanja daerah yaitu antara 60%-90%.

Sedangkan untuk rasio belanja pembangunan Kota Kediri tahun anggaran 2010 yaitu sebesar 22,16%, 2011 turun sebesar 14,63%, 2012 naik sebesar 22,50% dan turun lagi sebesar 14,29% tahun 2013, naik tahun 2014 sebesar 15,67% dan turun pada tahun 2015 sebesar 15,57%, ini berarti rasio belanja pembangunan pemerintah sudah baik akan tetapi ada beberapa tahun yang melampaui syarat proporsi belanja pembangunan yang mendominasi total belanja daerah yaitu antara 5%- 20% pada tahun 2010 dan 2012.

Dari kedua rasio tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Kediri tahun anggaran 2010-2015 sudah mengalokasikan pendapatan daerahnya secara seimbang antara belanja rutin dengan belanja pembangunan.

d. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Tabel 4.14

Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010-2015

| | Tahun Anggaran | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) | 102.109,37% | - | 798,86% | - | - | - |
| Rata- rata DSCR | 20.581,65% | | | | | |
| Keterangan | DSCR Kota Kediri Tahun 2009-2010 memiliki peluang untuk melakukan pinjaman apabila diperlukan karena terlihat bahwa DSCR berada diatas standar persyaratan > 2,5%. | | | | | |

Sumber: Data diolah

Dapat dilihat tabel 4.14 *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) pemerintah Kota Kediri untuk tahun 2010 yaitu sebesar 102.109,37% dan tahun 2013 sebesar 798,86% ini berarti pemerintah memiliki peluang untuk melakukan pinjaman apabila diperlukan kepada pihak lain karena DSCRnya berada diatas standar persyaratan yaitu > 2,5%. Dan untuk tahun anggaran 2011, 2013, 2014 dan 2015 Kota Kediri tidak mempunyai angsuran pokok, bunga, maupun biaya pinjaman sehingga DSCR tidak dapat dihitung.

e. Rasio Pertumbuh

Tabel 4.15
Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Kediri
TahunAnggaran 2010-2015

| Uraian | Tahun Anggaran | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rasio Pertumbuhan | | | | | | |
| Pertumbuhan PAD | - | 28,75% | 2,56% | 17,99% | 43,56% | 6,94% |
| Rata-rata Pertumbuhan PAD | 19,96% | | | | | |
| Pertumbuhan Total Pendapatan | - | 2,66% | 18,57% | 12,34% | 21,50% | 3,14% |
| Rata-rata Pertumbuhan Total Pendapatan | 11,64% | | | | | |
| Pertumbuhan Belanja Rutin | - | 10,71% | 6,33% | 14,28% | 10,54% | 14,58% |
| Rata-rata Pertumbuhan Belanja Rutin | 11,29% | | | | | |
| Pertumbuhan Belanja Pembangunan | - | -33,33% | 79,76% | -34,42% | 23,33% | 13,62% |
| Rata-rata Pertumbuhan Belanja Pembangunan | 9,80% | | | | | |
| Keterangan | Kinerja pemerintahan Kota Kediri menunjukkan pertumbuhan yang positif selama tahun 2010-2015 hanya pada belanja pembangunan yang pertumbuhannya negatif pada tahun 2011 dan 2013. | | | | | |

Dari tabel 4.20 dapat dilihat rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Kediri pada tahun 2010-2011 sebesar 28,75%, dan mengalami penurunan tajam pada tahun 2011-2012 sebesar 2,56%, akan tetapi naik sebesar 17,99% pada tahun 2012-2013, serta naik pada tahun 2013-2014 sebesar 43,56%, dan turun sebesar 6,94% pada tahun 2014-2015. Dan untuk rasio pertumbuhan total pendapatan tahun 2010-2011 sebesar 2,66%, naik tajam pada tahun 2011-2012 sebesar 18,57%, tetapi turun sebesar 12,34% pada tahun 2012-2013, dan kembali mengalami kenaikan sebesar 21,50% pada tahun 2013-2014 serta turun pada tahun 2014-2015 sebesar 3,14%. hal ini berarti bahwa kemampuan pemerintah Kota Kediri dalam mempertahankan dan meningkatkan sumber pendapatan daerahnya cukup baik, karena rasio tersebut cenderung naik.

Sedangkan untuk rasio pertumbuhan belanja rutin Kota Kediri tahun 2010-2011 sebesar 10,71%, turun 6,33% pada tahun

2011-2012, dan kembali naik 14,28% pada tahun 2012-

2013, mengalami penurunan pada tahun 2013-2014 sebesar 10,54%, tetapi naik lagi sebesar 14,58% pada tahun 2014-2015. Selanjutnya rasio pertumbuhan belanja pembangunan pada tahun 2010-2011 dan 2012-2013 bernilai negatif sebesar -33,33% dan -34,42% serta bernilai positif sebesar 79,76%, 23,33%, 13,62 yaitu pada tahun 2011-2012, 2013-2014 dan tahun 2014-2015 hal ini berarti pemerintah masih belum stabil dalam mengelola keuangan daerahnya terlihat masih ada rasio yang mengalami penurunan dan bernilai negatif.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung. 2009. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung:Alfabeta.

Agus Siswanto. 2008. *Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Studi Kasus Pada APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2004-2007*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.

Andi. Melisa.2012.*Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba*.Skripsi.Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Arikunto S,2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI,Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi.2010.*Prosedur Penelitian*: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi V). Jakarta:PT.Bineka Cipta.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Tiga. Jakarta: Erlangga.

David Efendi, Sri Wuryani.2011.*Analisi Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otoda Di Kabupaten Nganjuk*. Skripsi.Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Kediri.2010-2014.*Dokumen Laporan Keuangan*.

Google,*www.kedirikota.go.id*. Sejarah Kota Kediri diakses pada 6 Mei 2016.

Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*.Jakarta: Erlangga.

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama.Yogyakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahsun, Sulisyowati Firman dan Andre Purwanugraha, Herbertus. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ke2: Penerbit BPFE Yogyakarta.

Mardiasmo, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mentari Yosephen Sijabat, Chairul Saleh, Abdul Wachid.2013. *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*.Jurnal, Volume 2, Nomor 2, Universitas Brawijaya.

Nurharibnu Wibisono.2009.*Analisi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Madiun 2003-2007*.Jurnal.Volume 10. Nomor 1. Universitas Merdeka Madiun.

Nurharibnu Wibisono.2010.*Analisis Kinerja Dan Keberpihakan APBD Untuk Rakyat(Studi Kasus Di Kota Madiun Tahun 2004-2008)*. Tesis.Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakar.

Nursalam. 2003. *Konsep & Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*: Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan. Jakarta.Salemba Merdeka.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010. 2012 *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintah*. Cetakan Satu. Bandung.: CV Pustaka Setia.

Sugiyono . 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D***.** Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Bisnis*( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).Bandung:Alfabeta.

Yuni Kusuma.2014.*Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah* .Skripsi.Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri.